

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Lembaran Negara Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*. UU. Nomor 5 Tahun 1960 Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986. Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

_____. *Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*. UU Nomor 28 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 30 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 tahun 1997. Lembar Negara Nomor 50 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah*. PP Nomor 40 Tahun 1996 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643 Tahun 1996.

_____. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Permen 11 Tahun 2016. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016.

_____. *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*. Permen No. 9 Tahun 1999.

_____. *Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Permen No. 3 Tahun 1997. Permen No. 3 Tahun 1997.

B. Buku

- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kurniati, Nia. *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Moh.Mahfud MD dan SF Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakrta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2012.
- _____.*Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2010.
- _____.*Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2012.
- Waskito dan Hadi Arnowo. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.

C. Jurnal dan Tesis

- Achmad, Sriyanti. Tesis. *Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan Ma No.987 K/Pdt/2004)*. Universitas Diponegoro, 2008.
- Aynawati, Lily. Skripsi. *Pembuktian Pemilik Tanah Dengan Alat Bukti Berupa Surat (Girik C) Dan Keterangan Saksi dalam Mempertahankan Kepemilikannya (Studi kasus : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 708k/Pdt/2015)*. Universitas Esa Unggul, 2016.

Damara, Bakhtiar Dwiky. Skripsi. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Sertipikat Ganda*. Universitas Negeri Semarang, 2015.

Hapsari, Maria Emaculata Noviana Ira. Tesis. *Tinjauan Yuridis Putusan No. 10/G/Tun/2002/Ptun.Smg (Studi Kasus Sertifikat Ganda/ "Overlapping" Di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006.

Sahnan, M.Arba, I.Wira Pria Suhartana. Jurnal. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Universitas Mataram, 2019.

Slamet, Sri Redjeki. Jurnal. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Menyatakan Batal Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Mengandung Cacat Administrasi*. Universitas Esa Unggul, 2019.

Wijayanti, Sri. Tesis. *Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan Ma Tentang Sengketa Tanah Meruya Selatan)*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.

D. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/270148-sertifikat-cacat-hukum-dalam-hukum-perta-ff1b4b3e.pdf>. diakses. pada tanggal 18 mei 2020. jam 01.40 WIB.

<http://suflasaint.blogspot.com/2010/12/hak-hak-atas-tanah-seelum-uupa.html>, diakses pada tanggal 20 juli 2020, 14.30 WIB.